

EFEKTIVITAS DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

Putri Antou¹, Vekie A. Rumat², Mauna TH .B. Maramis³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : putriantou061@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas Dana desa dari 12 desa yang ada di kecamatan Talawaan kabupaten minahsa utara pada tahun 2015-2018 dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, jenis penelitian adalah Deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan metode wawancara, penyebaran kuisioner dan dokumentasi pada 12 desa yang ada di kecamatan Talawaan. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio criteria efektivitas, hasil penelitian menunjukkan efektivitas dana desa Talawaan terhadap pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa talawaan berada dalam kategori sangat efektif, hambatan yang di alami dalam merealisasikan dana desa yaitu pemahaman masyarakat terhadap Dana desa dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. Solusi untuk memberikan kebijakan terhadap pengelolaan dan penyaluran Dana Desa dengan tetap memperhatikan penguatan peran dan kelembagaan pemerintah. Pengelolaan anggaran desa pada berbagai bidang yang ada memerlukan manajerial dan akuntabel dalam menjaga agar dana yang ada dapat di salurkan sesuai dengan yang di rencanakan. perlu memperhatikan pula kesejahteraan para pekerja agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara efektif dan efisien, menjaga agar stabilitas fiskal tetap terkendali dan kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif.

Kata Kunci : *efektivitas, dana desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat*

ABSTRACT

The Village has important authority in assisting local governments in the implementation of governance including development. All this was done as a concrete step for the regional government in supporting the implementation of regional autonomy. This is study aims to look at the level of effectiveness of village funds from 12 village in talawaan sub- district, North Minahasa Regency from 2015 to 2018 in terms of development and empowerment of rural communities, the type of research is descriptive. Data collected by using interview method, questionnaire distribution and documentation on 12 villages in talawaan sub- district. Data analysis uses effectiveness techniques and effectiveness criteria ratios. The results of the study show the effectiveness of talawaan village funds for development and empowerment of the talawaan village community to be in the very effective category, the obstacles experienced in realizing village funds and disbursement of late village fund allocations. Solution to provide policies on the management and validation of village funds while still taking into account the strengthening of the role and institutions of government, management of village budgets in various fields requires managerial and accountable in ensuring that the available funds can be channeled as planned. It is also necessary to pay attention to the welfare of the workers so that economic activities can run effectively and efficiently, keep fiscal stability under control and the ability to make a number of effective breakthroughs or innovations.

Keyword : *effectiveness, village funds, development, community empowerment*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis dalam undang-undang no 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat, Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan di terima bertahap pembagian dana desa ini dihitung berdasarkan empat faktor yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kualitas geografi.

Pada sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, artinya bahwa dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip : efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa dijelaskan bahwa masyarakat desa diberi kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan terwujud. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien.

Salah satu program perintah dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa adalah dengan mengeluarkan Dana Desa. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa.

Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Pada pasal 4 Ayat 1 disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa.

Dalam penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kinerja perangkat desa dianggap masih rendah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD Desa), oleh karena itu sebagai lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat mewakili masyarakat untuk melakukan pengawasan kepada perangkat desa agar dapat mengelola Dana Desa secara efisien, ekonomis, efektif serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016). Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong 2013).

Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk : “ Menganalisis Efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara “

Tinjauan Pustaka

Pembangunan

Bachtiar effendi (2002:2) pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Menurut Soekanto (2005:437) pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki.

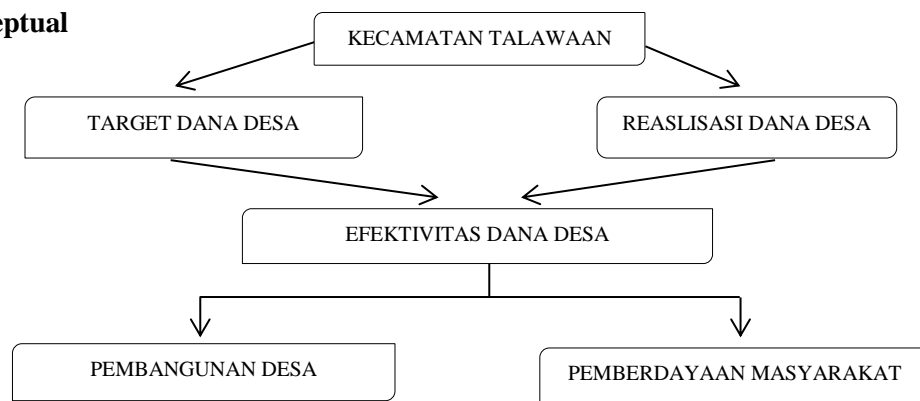
Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Model-model pemberdayaan: People Centre Development (i.e. IDT, Proyek Kawasan Terpadu (PKT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Raskin, BLT); Model Lingkaran Setan Kemiskinan; Model Kemitraan, dll.

Dana desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut . Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat .Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa.

Kerangka Konseptual



Gambar 1.1
Skema efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Talawaan
 Sumber : Kajian Teori, 2019.

Penelitian Terdahulu

Dini (2010) melakukan penelitian tentang “*Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan alokasi dana desa memiliki hubungan yang positif dengan pembangunan desa di kecamatan Stabat dan persepsi masyarakat terhadap dana alokasi desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan desa di Kecamatan Stabat.

Risya Novrita (2015) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)*. Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah program untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yakni: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap pertanggungjawaban atau pelaporan. Tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan kurang baik. Pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu: dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar dan kualitas sumber daya manusia. Namun, juga menemui beberapa faktor penghambat, yaitu: Rendahnya Sinkronisasi antara Perencanaan di Tingkat Desa dan Kecamatan, Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Sebagai Penunjang Operasional Administrasi Pemerintah Masih Terbatas, dan Kurangnya Intensitas Sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Masyarakat.

Nurliana (2013) yang melakukan penelitian tentang “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara*”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik di desa Sukomulyo, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa, Namun karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah terhadap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga pelaksanaan pembangunan fisik masih kurang dan membuat bangunan fisik kurang tepat sasaran.

2. METODE PENELITIAN

Data yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara didasarkan pada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber/objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui hasil studi keputusan maupun publikasi resmi dari berbagai instansi.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019 dengan lokasi penelitian dilaksanakan di 12 Desa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Observasi yaitu pengamatan langsung ke setiap desa di Kecamatan Talawaan yang menjadi subjek penelitian.
2. Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung kepada kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan juga masyarakat desa bersamaan dengan pengisian kuisioner.
3. Dokumentasi yaitu catatan atau dokumen resmi tertulis serta foto pengisian kuisioner dengan pihak yang terkait.
4. Kuisioner yaitu pengumpulan data dengan menyebarkan pertanyaan dalam bentuk angket kepada responden untuk memperoleh data sesuai dengan permasalahan peneliti yang akan dikembangkan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik sampling yang paling sering digunakan dengan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Dari 20.216 penduduk yang menjadi populasi penelitian, jumlah sampel ditentukan dengan rumus *slovin*. Adapun jumlah sampel penelitian adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = margin error (10%)

$$n = \frac{20.126}{1 + 20.126 \times 0.1^2} = 99,50$$

Dari hasil hitung 99,50 maka jumlah sampel akan digenapkan menjadi 100 sampel. Sampel dalam penelitian sebanyak 100 responden dengan masing-masing desa yang akan diwawancarai sebanyak 12 orang kepala desa, 28 orang ketua/anggota badan permusyawaratan desa dan 60 orang masyarakat desa. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penyebaran sampel adalah sebagai berikut:

Metode Analisis

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan analisis data efektivitas yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Abbdul Hakim,2002:66).

Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas Dana Desa pada 12 Desa di Kecamatan Talawaan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Dana Desa}}{\text{Target Anggaran Dana Desa}} \times 100\%$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100% tetapi alangka baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu, adapun kriteria rasio efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan Depdagri Kemendagri no 690.900.327 yaitu :

1. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
2. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif.

3. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif.
4. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif.
Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya >60% dapat dikatakan tidak efektif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

No.	Nama Desa	Tingkat Efektivitas			
		2015	2016	2017	2018
1	Talawaan	174,4	169,9	173,7	160,5
2	Tumbuhon	154,8	194,2	142,7	137,1
3	Kolongan	178,9	197,6	140,1	134,4
4	Mapanget	180,5	189,4	137,1	137,6
5	Winetin	164,5	184,6	146,5	154,1
6	Wusa	174,3	171,7	152,9	162,3
7	Warisan	164,2	176,8	138,3	145,3
8	Teep Warisa	173,4	191,2	149,9	158,3
9	Paniki Atas	166,7	186,1	147,1	159,9
10	Warisa Kampung Baru	165,4	185,1	146,3	132,7
11	Patokaan	170,7	186,4	153,4	137,1
12	Paniki Baru	164,3	183,7	145,1	156,7

Tabel 1.1 Tingkat Efektivitas Dana Desa di Kecamatan Talawaan

Untuk mengetahui bagaimana dampak dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan talawaan kabupaten minahasa utara maka di lakukan penelitian melalui pengumpulan data primer yaitu lewat wawancara dan penyebaran kuisioner di 12 desa di kecamatan talawaan.

1. Apakah dengan adanya dana desa dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat desa ?

Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuisioner di 12 desa yang ada di kecamatan talawaan maka jawaban yang di berikan oleh responden rata- rata 97% masyarakat desa menyatakan setuju bahwa dengan adanya dana desa pendapatan masyarakat di desa meningkat. dari hasil wawancara bersama dengan masyarakat desa mereka mengatakan bahwa dengan adanya dana desa maka sejumlah infrastuktur telah di bangun untuk membantu peningkatan produksi dan akses masyarakat dalam menunjang perekonomian masyarakat di desa, karena rata-rata masyarakat desa memiliki lahan pertanian yang nantinya hasil dari pertanian itu akan di jual sehingga menjadikan itu sebagai pendapatan dari masyarakat desa. berbagai infrastruktur yang telah di bangun dengan adanya dana desa antara lain : jalan desa, jembatan, jalan pertanian dan berbagai infrastuktur yang dapat menunjang dan mempermudah masyarakat dalam mengelola setiap hasil pertanian yang merupakan sumber pendapatan. Para petani yang dulunya harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menjual hasil pertanian mereka, sekarang dengan adanya pembangunan jalan perkebunan dan jalan desa serta jembatan maka dapat mempermudah akses jalan serta transportasi setiap petani yang ada di desa, sehingga dapat memperkecil biaya dan menambah pendapatan dari masyarakat.

2. Apakah dengan adanya dana desa dapat meningkatkan pendidikan masyarakat ?

Dana desa yang di berikan pemerintah pusat untuk membangun desa tentunya di gunakan secara efektif dan efisien oleh setiap desa, melalui dana desa pemerintah desa melakukan

pembangunan. Selain pembangunan infrastruktur desa, berupa jalan desa, dan sebagainya, pemerintah desa juga memanfaatkan dana desa untuk membangun sarana pendidikan berupa sekolah PAUD yang tentunya di realisasikan untuk pendidikan anak usia dini. Selain untuk membangun infrastruktur dana desa juga di gunakan untuk membayar insentif yang di berikan kepada guru PAUD, berbagai sarana pendidikan di realisasikan oleh pemerintah desa bukan hanya membangun PAUD pemerintah desa juga menganggarkan dana desa untuk peralatan buku dan peralatan belajar, serta pengadaan alat kesenian yang berupa alat musik tradisional kolintang, yang tentunya di harapkan pemerintah desa dapat memunculkan kreatifitas dan kesenian dari masyarakat dan menambah wawasan dan pengetahuan dari setiap masyarakat desa .berbagai program pendidikan selalu di sosialisasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa, karna tentunya pendidikan tidak hanya di dapatkan di lingkungan sekolah saja melainkan di manapun dapat di jadikan sebagi tempat untuk belajar. Untuk itu dengan adanya dana desa tentunya sangat membantu setiap masyarakat dalam meningkatkan pendidikan.

3. Apakah dengan adanya dana desa dapat meningkatkan kesehatan masyarakat ?

Pemanfaatan dana desa selama ini lebih banyak untuk pembangunan infrastuktur namun begitu, tidak tertutup kemungkinan pemanfaatnya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk untuk urusan kesehatan, melalui program pemberdayaan masyarakat misalnya untuk mengatasi masalah kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu) atau untuk oprasional kegiatan terkait kesehatan. Melalui dana desa di harapkan adanya peningkatan kesehatan masyarakat, mengurangi angka kematian ibu dan anak yang merupakan program dari di pemerintah pusat, berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuisioner maka jawaban responden tentang apakah dana desa dapat meningkatkan kesehatan sebagian besar masyarakat memberikan jawaban setuju, karena menurut masyarakat desa, melalui dana desa setiap bulanya pemerintah mengadakan berbagai sosialisasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, terhadap balita dan lansia serta pengobatan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada masyarakat. Dan adanya sosialisasi dari pemerintah bersama dengan dinas kesehatan dalam menunjang kesehatan masyarakat desa.

4. Apakah dengan adanya dana desa dapat menyerap tenaga kerja ?

Bagaimana dana desa berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja serta dapat menyerap tenaga kerja, berdasarkan hasil dari penyebaran kuisioner dan wawancara kepada masyarakat desa maka jawaban yang di berikan oleh responden menyatakan bahwa tentunya dana desa dapat menyerap tenaga kerja, dari hasil wawancara bersama dengan salah seorang petani desa yang mengatakan dengan adanya dana desa maka sangat membantu para petani dalam hal mengelola lahan pertanian, ada beberapa program yang di lakukan pemerintah desa dan sosialisasi yang dilakukan agar setiap petani mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dalam mengelola hasil pertanian mereka, sosialisasi yang di lakukan pemerintah desa juga antara lain adalah memberikan sosialisai pupuk dan bibit ikan kepada petani dan memberikan bantuan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat desa, saat ini masyarakat desa ada berwirausaha mengembangkan bisnis mereka dan tentunya menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. dan menyerap tenaga kerja , dana desa juga memberikan bantuan terhadap UMKM yang ada di desa.

5. Apakah dana desa selalu di sosialisasikan kepada masyarakat ?

Dari hasil penyebaran kuisioner dan wawancara maka hasil yang di dapatkan mengatakan bahwa masyarakat desa setuju bahwa dana desa selalu di sosialisasikan kepada masyarakat, dalam pengolaan dana desa tentunya ada berbagai pihak yang mengelola, harapan dari setiap masyarakat adalah supaya dana desa selalu di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat desa dapat mengetahui program program dan pembangunan apa saja yang telah di lakukan pemerintah desa melalui dana desa, dana desa harus transparan setiap dana yang di keluarkan oleh desa harus jelas tujuannya agar tidak terjadi penyalagunaan. Maka untuk itu sosialisasi dana desa terhadap masyarakat sangatlah di perlukan dan saat ini di 12 desa yang ada di kecamatan talawaan selalu melakukan sosialisasi dan desa di masing- masing desa.

Pembahasan

Hasil penelitian menyatakan bahwa dana desa dapat meningkatkan pembangunan desa lewat pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat, yang di lakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. sehingga mampu memperbaiki perekonomian setiap desa yang ada di kecamatan talawaan kabupaten minahasa utara di antaranya : desa Talawaan, desa Tumbuhon, desa kolongan, desa mapanget, desa winetin, desa patokaan, desa wusa, desa warisa, desa teep warisa, desa paniki atas, desa warisa kampung baru , dan desa paniki baru

Hasil penelitian ini cocok dengan teori dari Katz (dalam Yuwono 2001:47) mengatakan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, sebagai usaha yang telah dilakukan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Aparatur desa, mengatakan bahwa menunjang visi misi bupati minahasa utara untuk selalu mensejahterakan warga, maka kecamatan talawaan fokus melakukan pemabangunan khususnya di bidang pertanian. Bukan berarti sektor lainya tidak penting, hal ini di lakukan karena rata-rata masyarakat desa di kecamatan talawaan berprofesi sebagai petani. Program pemberdayaan masyarakat juga di lakukan untuk menunjang pembangunan sektor pertanian yaitu dengan memngmpulkan kelompok kelompok tani untuk di lakukan pelatihan.

Partisipasi masyarakat pun sangatlah penting dalam menunjang pemabangunan di setiap desa agar desa mampu mencapai setiap program yang sudah di targetkan. Ide ide serta pendapat dari masyarakat sangat di butuhkan untuk membangun Desa.

Berdasarkan teori Scumpeter, Pembangunan ekonomi akan berkembang pesat dalam masyarakat yang menghargai dan merangsang setiap orang untuk menciptakan hal-hal baru (inovasi) dan lingkungan yang paling cocok untuk itu adalah lingkungan masyarakat yang menganut paham *Laissez Faire*, bukan dalam masyarakat sosialis ataupun komunis yang cenderung mematikan kreativitas penduduknya.

Penyaluran dana desa juga dapat meningkatkan pendidikan masyarakat, berdarkan teori dari Todaro dan Stephen C. Smith (2006), yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menunjukan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, diantaranya peningkatan pendidikan. Dengan adanya penyaluran dana desa oleh pemerintah, tingkat pendidikan masyarakat desa di Kecamatan Talawaan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembangunan sarana-sarana pendidikan dan sekolah yang dibangun seperti pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD). Dengan meningkatnya pendidikan masyarakat desa di kecamatan Talawaan maka mampu menunjang dalam perkembangan desa dilihat dari tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat.

Peningkatan kesehatan masyarakat desa kecamatan Talawaan juga merupakan salah satu dampak dari penyaluran dana desa. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pemenuhan kebutuhan dasar untuk pengembangan pos kesehatan desa, polindes dan posyandu yang ada di kecamatan Talawaan Hasil penelitian ini sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang tersebut di atas dapat kita cermati bahwa salah satu ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan kesehatan.

Pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat desa dalam hal penyaluran dana desa sehingga dapat meminimalisir penyelewengan penggunaan dana desa. Dengan demikian dana desa dapat di dimanfaatkan dengan baik sesuai tujuan penggunaan dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Hasil evaluasi secara langsung menyatakan bahwa dana desa mampu memberikan peningkatan terhadap tingkat pembangunan, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat, menyerap tenaga kerja serta mampu mengurangi kemiskinan di 12 desa di kecamatan Talawaan.

Dari hasil penelitian berdasarkan skala rasio efektivitas hasil yang didapatkan yaitu 12 desa di kecamatan talawaan memiliki skala rasio efektivitas lebih dari 100% yang tentunya penggunaan dana desa di kecamatan talawaan dapat dikatakan sangat efektif, skala rasio efektivitas yang menunjukkan lebih dari 100% yang disebabkan karena target dana yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan target dana tahun sebelumnya. Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa Kecamatan Talawaan ternyata masih memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu;

Wasistiono dan Tahir (2006:96) menyatakan bahwa unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional.
3. Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.

Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas, dan pekerjaan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil uji efektivitas Dana Desa khususnya di Desa : Talawaan, Tumbuhon, Kolongan, Mapanget, Winetin, Patokaan, Wusa, Warisa, Teep Warisa, Paniki Atas, Warisa kampung Baru, Paniki Baru pada Tahun 2015- 2018 sudah berada dalam kategori sangat efektif menunjukkan bahwa dana desa yang disalurkan di 12 desa yang ada di kecamatan talawaan dapat dikatakan tepat sasaran.
2. Dari hasil sampel kuisioner Responden menunjukkan bahwa dana desa mampu memberikan dampak secara langsung terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di 12 desa di kecamatan talawaan kabupaten minahasa Utara. Dengan adanya dana desa juga dapat disimpulkan bahwa dana desa dapat menurunkan angka kemiskinan di desa dengan adanya pembangunan yang tepat sasaran serta mampu di realisasikan kepada fasilitas desa dan masyarakat sesuai dengan tujuan dan penggunaannya.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah desa
Dengan hasil penelitian ini, maka untuk Pemerintah Desa kedepan adalah memberikan kebijakan terhadap pengelolaan dan penyaluran Dana Desa dengan tetap memperhatikan penguatan peran dan kelembagaan pemerintah. Pengelolaan anggaran desa pada berbagai bidang yang ada memerlukan manajerial dan akuntabel dalam menjaga agar dana yang ada dapat disalurkan sesuai dengan yang direncanakan. perlu memperhatikan pula kesejahteraan para pekerja agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara efektif dan efisien, menjaga agar stabilitas fiskal tetap terkendali dan kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif.
2. Bagi masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan kepada masyarakat agar selalu aktif dalam mendukung program pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan yang memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penyerapan tenaga kerja sehingga kesejahteraan masyarakat yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat tercapai.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan kiranya dapat menjadi pembelajaran dan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. 2015. *Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa*. PATIRO. Jakarta.
- Bactiar, E. 2002. *Pembangunan Ekonomi Daerah Berekeadilan*. Kurniakalam Semesta. Yogyakarta.
- Hakim, A. 2006 *Analisis Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah*. JRBI. Vol.2 No.2 Tahun 2006 Hal. 165-180. <https://elib.inikom.ac.id> . Diakses 10 mei 2019
- Nurliana. 2013. *Pengalokasian Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Sukumulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajamen Paser Utara*. *Jurnal administrasi Negara*. Vo.1 No.3 Hal 1059- 1007. <https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id> Diakses 10 juni 2019
- Undang- Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. <https://m.hukumonline.com> . Diakses 3 mei 2019
- Undang- Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. <https://dapurpendidikan.com> . Diakses 3 mei 2019
- Sari Dini, G (2010) *Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan pembangunan Desa di kecamatan stabat kabupaten langkat*. *Jurnal Ekonomi Universitas Sumatera Utara*. Vol.12 No.8 Tahun 2010. www.repository.usu.ac.id . Diakses 10 juni 2019
- Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Smith, S. C . 2006 *.Pembangunan Ekonomi (Edisi kesembilan, Jilid 1)* . Erlangga. Jakarta.
- Wastitiono, S. 2006. *Prospek Pembangunan Desa*. CV: Fokusmedia. Bandung.
- Windagdo, Widodo, Ismail. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.XIX No.2 Tahun 2016 Hal.323-340. <https://www.researchgate.net> . Diakses 20 juni 2019
- Yuwono, T. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak)*. UNDIP. Semarang.